

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa
Tengah

Nomor : 524/07

Tanggal : 2 Januari 2018.

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						
a.							
b.	Rencana Strategis	Kepala Dinas	Kasubbag Program	2013	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website Disnak Keswan
c.	Struktur Organisasi dan Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Disnak Keswan
d.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Disnak Keswan
e.	Tugas, wewenang, fungsi	Kepala Dinas	Kasubbag Program	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Disnak Keswan
f.	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tentatif	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Disnak Keswan
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris/ Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
b.	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Kepala Dinas	Kepala Bidang/ Kepala Balai	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
e.	Nilai Anggaran	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
f.	Agenda penting Dinas Peternakan dan Keswan						
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD, Kabupaten/ Kota pada th. berjalan	Kepala Dinas	Kepala Bidang/Balai pengampu	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
	-Rencana pelaksanaan Diklat dll.	Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
	- Agenda penting lainnya	Kepala Dinas	Kepala Bidang/Balai pengampu	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
4.	Laporan Layanan Informasi Publik	Kepala Dinas	Sekretaris/ Kasubbag Program	Tri Wulan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun setelah ditetapkan	Meja Layanan Informasi
5.	Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Disnak Keswan	Kepala Dinas	Sekretaris/ Kasubbag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Disnak Keswan
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
1)	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Dinas	KPA	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
2)	Pengumuman proses pengadaan	Kepala Dinas	KPA	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan

B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Dan Tempat Pembuatan	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian	Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun setelah perubahan	Website Disnak Keswan
b.	Rencana Strategis	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website Disnak Keswan
c.	Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Disnak Keswan
d.	Pidato Sambutan Kepala Dinas dalam kesempatan	Kepala Dinas	Staf PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	Hard copy	Selama berlaku	Website Disnak Keswan

II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Biodata elektronik PNS (database)	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		Pasal 17 huruf h			HAM	
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhikukan	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Daftar nilai DP-3 PNS	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Data rekam medis PNS	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI no. 269/MENKES/PER / III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanan dan kenyamanan PNS
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i -PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i -UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
9	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j -Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ▪ Reviu Laporan Keuangan, 	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, -PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. -Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah -Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah -Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. 	<p>LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.</p> <p>LHP belum bersifat final.</p>	Tak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO

